



Kecak
Bali
Vol.2/2025

KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali



APBN

SARBAGITA

Triwulan I Tahun 2025

Kabar Gembira
Itu Bernama
"Tunjangan Hari Raya"

Mengenal Lebih Dekat,
Coretax Si Aplikasi
Pajak Terbaru

Dibalik Layar
Kebijakan Efisiensi



SEKAPUR SIRIH

Buletin KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI) Volume 2 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN, TKD, Pencairan THR dan Kebijakan Efisiensi yang dilaksanakan oleh KPPN Kota Denpasar sebagai *Treasury Opration* dan *Financial Advisor*.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 2 Tahun 2025 antara lain Realiasasi APBN dan TKD Tahun 2025, Pencairan THR, Kebijakan Efisiensi dan Perpajakan Bendahara *Coretax*.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Kota Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) serta mewujudkan layanan perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.



TRIMO YULIANTO
KEPALA KPPN KOTA DENNPASAR

DAFTAR ISI

4. Realisasi APBN Triwulan I 2025
5. Realisasi TKD Triwulan I 2025
8. Kabar Gembira Itu Bernama "Tunjangan Hari Raya"
10. Dibalik Layar Kebijakan Efisiensi
13. Mengenal Lebih Dekat, Coretax Si Aplikasi Pajak Terbaru
14. PUNAPI APBN
16. Jurnal Kegiatan
19. Teka-Teki Silang
20. Team KECAK BALI

Realisasi APBN Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan 31 Maret 2025



PAGU 3,48 T	REALISASI 975 M	PERSENTASE 28,03%
-----------------------	---------------------------	-----------------------------



PAGU 3,4 T	REALISASI 477 M	PERSENTASE 13,99%
----------------------	---------------------------	-----------------------------



PAGU 846 M	REALISASI 21 M	PERSENTASE 2,51%
----------------------	--------------------------	----------------------------



PAGU 13 M	REALISASI 6,6 M	PERSENTASE 50,11%
---------------------	---------------------------	-----------------------------



PAGU 6,97 T	REALISASI 1,8 T	PERSENTASE 26,13%
-----------------------	---------------------------	-----------------------------

TOTAL	PAGU 14,72 T	REALISASI 3,3 T	PERSENTASE 22,43%
--------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

Highlight APBN Triwulan I
1. Penyaluran THR dan Gaji ke-13
2. Coretax

Realisasi TKD Triwulan I Tahun 2025

JENIS TKD	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
DAU	3,6 T	1,1 T	30,45%
DBH	555 M	56 M	10,10%
DAK FISIK	299 M	0	0
BOSP	761 M	373 M	49%
BOK PUSKESMAS	31 M	714 JUTA	2,2%
DAK NON-FISIK LAINNYA	789 M	98 M	12,4%
DANA DESA	288 M	171 M	59,33%
INFESTASI FISKAL	121 M	11 M	8,9%

- Highlight TKD
- Penyaluran Dana Desa Tahap I telah selesai, dimana Kabupaten Tabanan sebagai Pemda tercepat mengajukan dokumen syarat salur.
 - Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah tersalur sebesar Rp 66.546.684.800 yang langsung tersalur ke rekening masing-masing guru. Proses penyaluran ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus melalui RKUD terlebih dahulu.
 - Pagu anggaran untuk DAK Fisik ini masih termasuk dengan bidang yang terkena pencadangan seperti subbidang Irigasi dan Jalan.



Pura Gunung Lebah di Desa Ubud, Kabupaten Gianyar



Puri Anyar *Art Space* di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Kabar gembira itu bernama “Tunjangan Hari Raya”



Sumber Foto: www.setkab.go.id
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan persnya terkait kebijakan THR dan bonus hari raya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

Selintas Pandang

Sebagaimana pidato Presiden yang disampaikan pada tanggal 11 Maret 2025, bahwa pada tahun 2025 ini kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan akan diberikan kepada 9,4 juta aparatur negara yang meliputi Aparatur sipil Negara (ASN), Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI-Polri, Pensiunan, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan.

Berkaitan dengan hal ini, telah diterbitkan pula Peraturan Presiden (PP) nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Adapun besaran THR Keagamaan yang dibayarkan berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta 100% tunjangan kinerja bagi ASN Pusat, prajurit TNI-Polri, serta hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Hal yang sama, Presiden juga memberikan arahan terkait pemberian THR bagi pegawai BUMN, BUMD, karyawan swasta serta pemberian bonus hari raya bagi para pengemudi *on line*.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke tiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya secara teknis,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta jajaran front liner, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pencairan THR dimaksud sebagai belanja negara.

Adapun tujuan dari kebijakan pemberian THR ini, sebagaimana arahan Presiden, adalah bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul fitri. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penurunan harga tiket pesawat 13% sampai dengan 14% serta tarif tol guna lebih mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2025.

Kondisi Lapangan

Petunjuk Teknis terkait pembayaran THR tahun 2025 yang dipedomani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-101/PB/2025 tertanggal 12 Maret 2025. Berkaitan dengan hal ini, maka KPPN Denpasar yang memiliki wilayah kerja meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (SARBAGITA) secara proaktif menginformasikan hal dimaksud kepada seluruh satker mitra kerja guna memperlancar proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan pembayaran THR disampaikan melalui penyampaian Surat Permintaan Membayar (SPM) belanja pegawai (jenis belanja 51) oleh satuan kerja mitra

yang didasarkan pada penerimaan penghasilan bulan Februari 2025 tanpa potongan absensi, namun tetap terdapat potongan pajak penghasilan (PPH pasal 21). Penyampaian oleh satker mitra KPPN Denpasar di mulai pada tanggal 17 Maret 2025.

Pada periode tahun 2025, realisasi pembayaran THR yang telah dilaksanakan oleh KPPN Denpasar sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp192,7 Miliar. Realisasi THR tersebut diharapkan selain mendukung tujuan kebijakan pemberian THR sebagaimana amanat presiden tersebut diatas juga mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional, karena secara ekonomis, kebijakan pemberian THR memberikan kemampuan **“lebih”** dalam meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama di momen Iedul Fitri.

Kemampuan **“lebih”** dalam konsumsi, secara teoritis akan berdampak pada peningkatan permintaan suatu produk oleh konsumen (*demand*) dan hal ini sudah barang tentu akan di respon oleh produsen dengan menyediakan produk yang diinginkan oleh konsumen (*supply*). Kondisi inilah yang mendukung pegerakan ekonomi secara riil.



Oleh:

Heran Subagio

Kepala Seksi Pencairan Dana

Penutup

Kebijakan pemberian THR oleh pemerintah secara ekonomis, diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi riil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan membawa dampak positif pada kondisi perekonomian nasional.

Dukungan terhadap kebijakan pemberian THR secara teknis lapangan agar berjalan dengan lancar, khususnya di wilayah SARBAGITA, KPPN Denpasar menjadi pihak yang memiliki peran strategis guna melaksanakannya. Dalam hal ini KPPN Denpasar dalam skala mikro turut memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi riil di wilayah SARBAGITA, selain juga berupaya mewujudkan kegembiraan sosial masyarakat sebagaimana judul dari artikel ini.

“Kebijakan pemberian THR bagian dari upaya pemerintah dalam membantu menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul fitri”



Dibalik Layar Kebijakan Efisiensi

Memasuki awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi besar-besaran di seluruh Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui Inpres tersebut, Presiden meminta seluruh Menteri / Kepala Lembaga serta seluruh Kepala Daerah untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja dibawah kewenangannya pada tahun anggaran 2025. Nominal yang ditargetkan oleh Presiden atas hasil efisiensi adalah sebesar Rp306.695.177.420.000,00 yang terdiri dari Rp256.100.000.000.000,00 yang berasal dari anggaran belanja K/L dan Rp50.595.177.420.00,00 yang berasal dari Dana Transfer ke Daerah.

Rencana efisiensi ditujukan untuk belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin, yang diprioritaskan selain dari :
-Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
-Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025;
-Anggaran yang bersumber dari PNPB-BLU kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025; serta
-Anggaran yang bersumber dari SBSN dan menjadi underlaying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Sedangkan belanja yang dikecualikan dari efisiensi tersebut adalah Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial.

Dengan berlakunya kebijakan efisiensi tersebut, pagu APBN yang dikelola oleh KPPN Denpasar sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) pada wilayah kerja kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, dan Kab. Tabanan berubah signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan secara yoy pagu APBN K/L yang dikelola KPPN Denpasar per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar 7,7 triliun sedangkan per tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar 10,7 triliun. Terjadi penurunan besaran pagu yang dikelola dengan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 38%. Penurunan signifikan juga dapat dilihat dari realisasi anggaran per masing-masing belanja. Sampai dengan 31 Maret 2025 realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial masing-masing sebesar 13,88%, 2,49%, dan 50,11%. Realisasi mengalami penurunan jika dibandingkan yoy sampai dengan 31 Maret 2024, dengan realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial masing-masing sebesar

“Kebijakan efisiensi juga berdampak pada perlunya penetapan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran yang baru pada masing-masing K/L”

16,95%, 9,80%, dan 56,32%.

Penurunan ini, disebabkan karena selama bulan Januari dan Februari 2025, masih terdapat proses revisi efisiensi anggaran pada tingkat pusat, yang menyebabkan adanya pemblokiran pagu, sehingga pagu anggaran tidak dapat direalisasikan oleh satuan kerja. Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada perlunya penetapan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran yang baru pada masing-masing K/L dalam rangka menyesuaikan kondisi lapangan dengan kebijakan efisiensi. Namun, berdasarkan konfirmasi satuan kerja lingkup KPPN Denpasar, kebijakan efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja satuan kerja karena target yang tercantum pada DIPA tidak berubah, kecuali untuk beberapa kegiatan seperti pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin. Hal ini menyebabkan, satuan kerja wajib menganalisis dan merumuskan kembali strategi pencapaian output dengan lebih efisien.

Perbedaan yang cukup signifikan juga terjadi pada pelaksanaan APBD Provinsi Bali. Dengan berpedoman Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025 Pasal 5 yakni sebagian dana Transfer ke Daerah untuk bidang infrastruktur akan dilakukan pencadangan. Total efisiensi anggaran yang dicadangkan cukup signifikan dengan total Rp 90 Miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan rincian sebesar Rp 37 Miliar untuk Provinsi Bali, Rp 5 Miliar untuk Gianyar, Rp 4 Miliar untuk Badung, dan Rp 45 Miliar untuk Tabanan. Berdasarkan diskusi bersama dengan perwakilan BPKAD, BAKEUDA, dan Inspektorat Daerah di wilayah KPPN Denpasar pada acara “Focus Group Discussion (FGD) Percepatan DAK Fisik Tahap I TA 2025”, kebijakan efisiensi ini berdampak pada pengadaan barang karena di beberapa aplikasi masih terdapat dana yang seharusnya dicadangkan. (Nit, Luh)

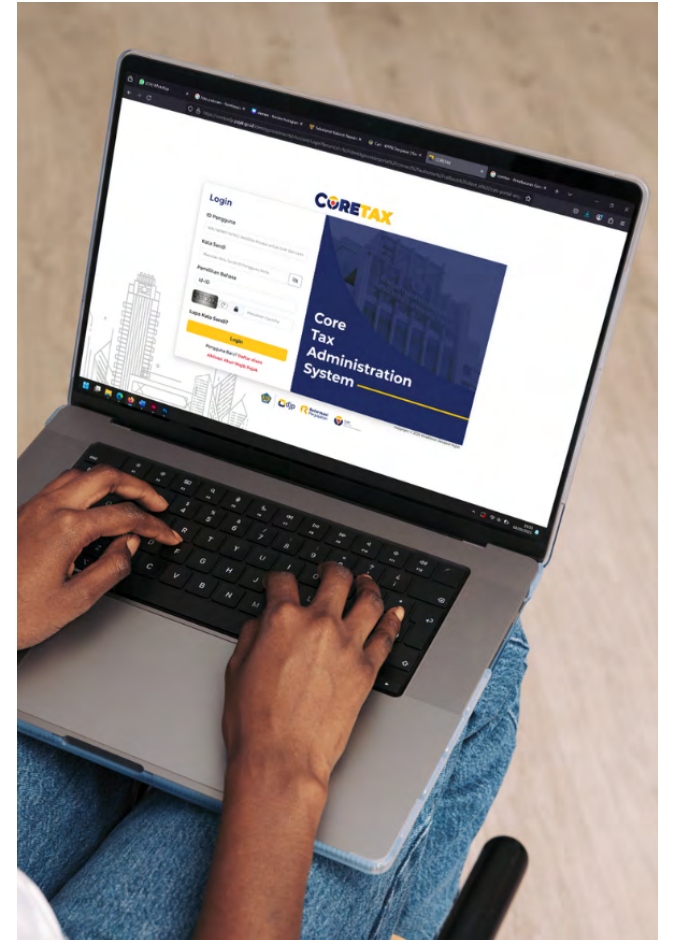


Mengenal Lebih Dekat, **CORETAX** si Aplikasi Pajak Terbaru

Menyambut tahun baru 2025, masyarakat disuguhkan sesuatu yang baru. Mulai awal Januari 2025, sistem perpajakan nasional resmi bermigrasi ke aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CORETAX). Aplikasi CORETAX digadang – gadang merupakan suatu sistem all in one, dimana wajib pajak dapat mengakses segala informasi dan kewajiban perpajakan dalam satu aplikasi saja.

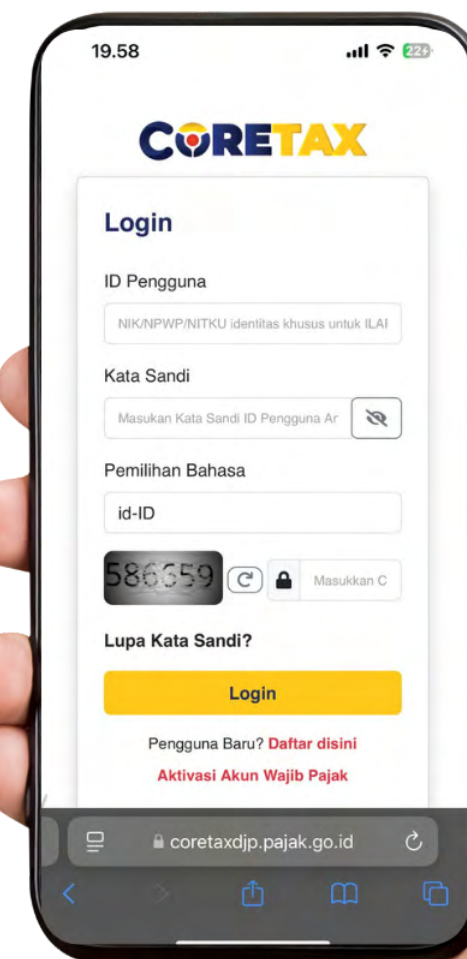
Implementasi Aplikasi CORETAX tentunya akan berpengaruh dengan proses bisnis pada satuan kerja. Utamanya, pada proses pembuatan billing setoran, penggunaan akun deposit, hingga proses pelaporan SPT masa. Selain itu, dari sisi perbendaharaan, juga perlu adanya penyesuaian pada Aplikasi SAKTI yang digunakan oleh para bendahara satuan kerja untuk merekam transaksi.

Pada hari Rabu, 26 Februari 2025, KPPN Denpasar telah menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan “SAKTI x CORETAX” pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Kegiatan sosialisasi ini turut mengundang tim Kanwil DJP Provinsi Bali sebagai narasumber. Agenda utama dari kegiatan ini adalah membahas dan penyamaan persepsi terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.



“Aplikasi CORETAX merupakan suatu sistem all in one pada proses pembuatan billing setoran, penggunaan akun deposit, hingga proses pelaporan SPT masa.”

Dalam proses implementasinya pada Aplikasi SAKTI, terdapat dua skema yang dapat digunakan oleh bendahara satker dalam melakukan pencatatan pungut dan setor pajak atas transaksi yang berasal dari pembayaran menggunakan mekanisme uang persediaan (UP). Kemudian, untuk alur mekanisme pembayaran langsung (LS), satker akan menerima tagihan dan faktur dari rekanan, selanjutnya PPK melakukan penghitungan dan melanjutkan dengan pembuatan SPP sampai dengan SPM LS. Jika dibandingkan dengan aplikasi terdahulu, Aplikasi CORETAX akan mengubah cara pengelolaan laporan dan pembayaran pajak secara signifikan. Apabila satker memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Aplikasi CORETAX, satker dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Mari kita dukung dan sukseskan implementasi Aplikasi CORETAX untuk menghadapi perubahan ke arah yang lebih unggul dan semakin maju. (Ved)



Nuansa Penjor pada Tradisi Ngerebong di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

PUNAPI APBN



Sumber Foto :
Arsip Dokumentasi BDK Denpasar

Pembangunan Gedung Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar dilaksanakan menggunakan APBN dengan total nilai Rp 127.150.000.000. Proyek konstruksi tersebut dilaksanakan tanggal 5 Februari 2024 s.d. 30 November 2024.



JURNAL KEGIATAN

01 16 Januari 2025



Sosialisasi Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Unaudited Tahun 2024

Kegiatan ini membahas current issues pada akhir tahun anggaran dan langkah-langkah penyelesaiannya terkait dengan pelaporan

02 16 Januari 2025



Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025

Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan semangat baru bagi seluruh pegawai KPPN Denpasar di tahun 2025

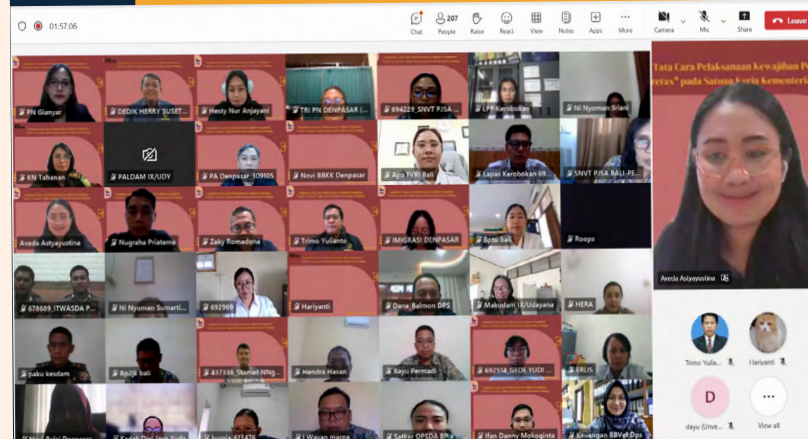
03 4 Februari 2025



Donor Darah Perwakilan Kementerian Keuangan Bali

Perwakilan Kementerian Keuangan Bali melaksanakan kegiatan Donor Darah rutin yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

04 26 Februari 2025



Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan "SAKTI x Coretax" pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Kegiatan ini membahas sehubungan dengan SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

05 14 Maret 2025



SALAK BALI EPISODE 88

Pembayaran THR dan THR Keagamaan Tahun 2025

06 27 Maret 2025



Pembinaan Mental

Pembinaan Mental yang ditujukan bagi seluruh pegawai KPPN Denpasar dengan topik Berfikir Positif dalam Berbagai Situasi



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

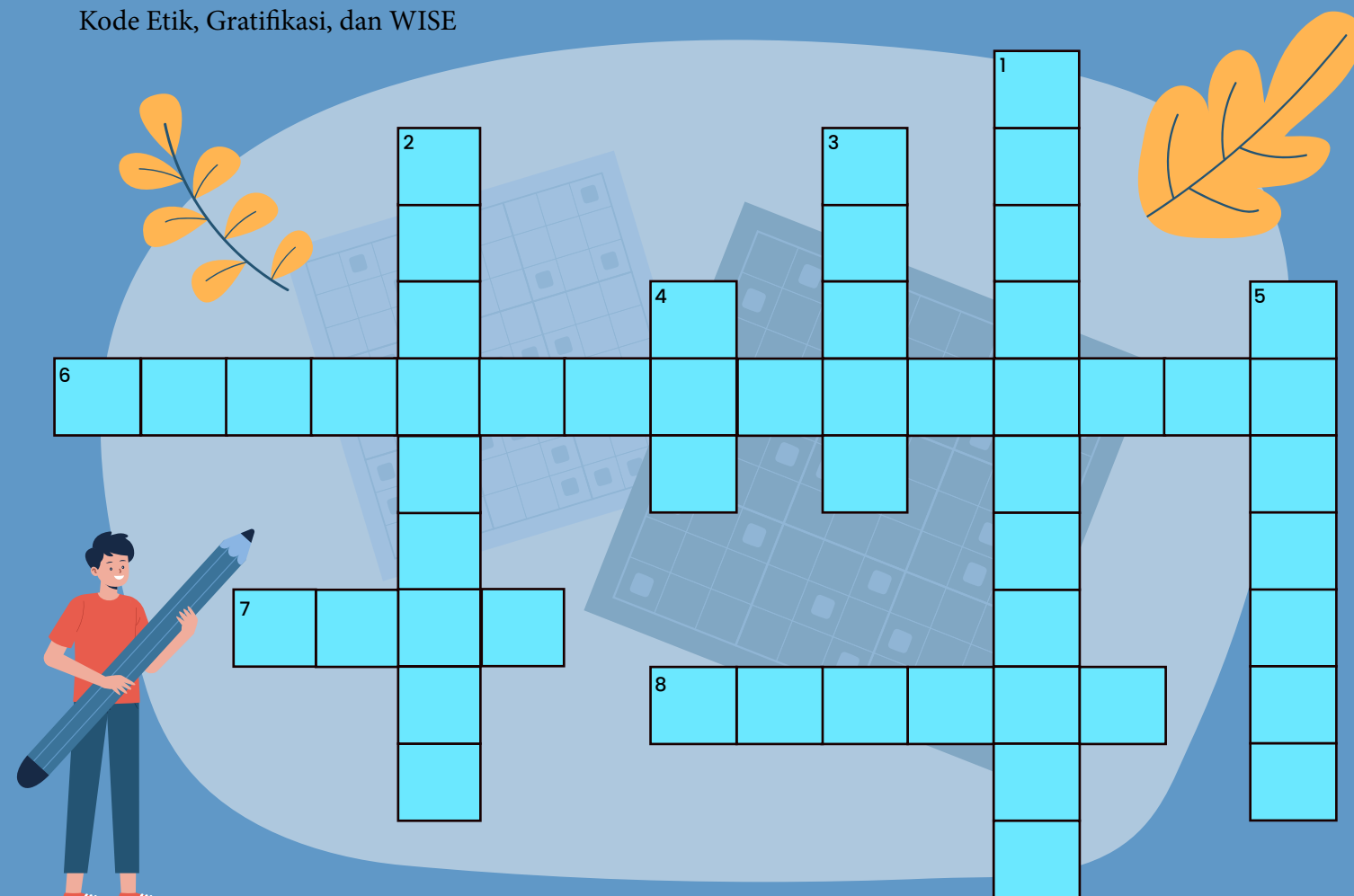


DJPb
Indonesian Treasury

Intress

KUIS Kok GratiSE

Kode Etik, Gratifikasi, dan WISE



Mendatar

- Disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja termasuk butir-butir kode etik dan kode perilaku kementerian nilai ...
- Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran, korupsi, penyuapan, atau kecurangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebut ...
- Teguran lisan merupakan jenis hukuman disiplin ...

Menurun

- Pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), tiket perjalanan, fasilitas penginapan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik/ non elektronik, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara disebut ...
- Tindakan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri, disebut ...
- Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat sebelum dan setelah libur hari raya keagamaan dan cuti bersama biasanya menggunakan metode ...
- Laporan penerimaan gratifikasi ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi dapat disampaikan melalui aplikasi ... KPK.
- Pegawai dan Penyelenggara Negara yang menolak atau menerima Gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada UPG Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama ... hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan gratifikasi. (dalam huruf)



SELAMAT
KEPADA PEMENANG
KECAK BALI VOL.1/2025

Kak Henia
henia1802@gmail.com

Syarat dan Ketentuan

- Kirim jawaban Anda berupa foto halaman Kuis Cari Kata ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 2/2025.
- Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon, alamat dan email.
- Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 30 Juni 2025.
- Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
- Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.



Trimo Yulianto
Penanggung Jawab



Totok Iman Santoso
Pimpinan Redaksi



Made Pradnyanti
Kontributor



Nadhelia Sesar Tasya S.
Kontributor



Embun Nurani Wulandari
Layout dan Desain



Devika Yulan Saputri
Kontributor

MEET THE TEAM



Untea Amalia Cahyadi
Kontributor



Aveda Astyayustina
Kontributor



Galuh Ajeng Aulia Putri
Kontributor



Adella Gysta Aviera Putri
Kontributor



Intan Radha Hapsyiah
Kontributor



M.G. Satya Narayana
Layout dan Desain